

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. I., Ari, V., Akadiati, P., & Edwin, M. (2023). *Determinasi Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. 2(1).
- Agustina, N., Sakawati, H., Fitri, A., Handayani, P. D., & Saguni, D. S. (2025). *Pengaruh Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone The Influence of Governance and Community Participation on the Effectiveness of Village Fund Management in Mattirobulu Village , Bone Regency*. 1(2), 57–73. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.556>
- Angelina, A. . (2022). Pengertian Keuangan dan Pengelolaan Sesuai Kategori. *Modal Rakyat*. <https://www.modalrakyat.id/blog/pengertian-keuangan>
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). *Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa*. 1.
- Asy'ari, Makalao, D. A. M., & Irawan. (2023). *ANALISIS METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*. 11(02), 152–175.
- Dunggio, Y. (2025). *ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DESA DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA*.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). *Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab / Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berubah tergantung situasi tertentu . (Arib , M . F . , dkk , 2024)*.
- Haikal, M. F., & Mauliana, D. (2022). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR) PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (CASE STUDY OF e-KTP SERVICE IN TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR*. 28(April).
- Hayes, A. (2026). Apa Arti Keuangan? Sejarah, Jenis, dan Pentingnya Dijelaskan. *Investopedia*. <https://www.investopedia.com/terms/f/finance.asp>
- Hesti, Abdullah, A., & Sartono. (2024). *Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tridana mulya* 123. 10(3), 321–338.
- Hidayah, A. . (2023). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. *Kementrian Keuangan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>

- Huda. (2025). Warga Kaladawa Protes, Tuntut Kades Transparan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *KabarJateng.ID*. <https://kabarjateng.id/headline/warga-kaladawa-protes-tuntut-kades-transparan-dalam-pengelolaan-dana-desa/>
- Jatmiko. (2025). Teknologi Digital: Kunci Transparansi Dana Desa di Era Modern. *Panimbang*. <https://panimbang.desa.id/teknologi-digital-kunci-transparansi-dana-desa-di-era-modern/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–16.
- Manthovani, R. (2025). Kasus Korupsi Dana Desa Melonjak di 2025. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/jamintel-kejagung-kasus-korupsi-dana-desa-melonjak-di-2025-2115313>
- Masriani, & Mardika, I. H. (2025). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Malinau Hulu*. 42(1), 50–57.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Misriani, D., Alqadri, B., Pancasila, P., & Mataram, U. (2023). *Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*. 8(1), 13–19.
- Noerchoirunisa, S. (2023). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)*.
- Santosa, P. K. (2023). AKUNTABILITAS, TRANSPARASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL. *Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama*, 1–124.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Septaria, D., Zahira, G., Kuantitatif, P., Ilmiah, P., & Data, A. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF PENDEKATAN ILMIAH UNTUK ANALISIS DATA*. 7, 11279–11289.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173.
- Sugiman, S. (2018). Binamulia Hukum. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.

- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER*. 5(September), 110–116.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*. (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. 1, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). *TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA: EVALUASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI*. 2(2), 109–123.
- Zahro, S. ., Liyani, A. ., & Manurung, H. (2023). *Faktor-faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 1(3).